

## PENGIRIMAN PASUKAN GARUDA KE VIETNAM TAHUN 1973-1975

**Makhrus Nur Faqih**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

**Coory Liana**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan di Vietnam membawa ketegangan politik di Asia Tenggara, hal ini mendorong pemerintah Indonesia ingin berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dan berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian masalah Vietnam dengan membentuk Pasukan Kontingen Garuda Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Indonesia menyadari bahwa kerja sama regional itu tidak akan berhasil meningkatkan kemakmuran nasional dan regional bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan sebaik-baiknya, jika tidak terdapat keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. Dengan merangkul kerja sama kawasan di Asia Tenggara dalam forum ASEAN, Indonesia ingin berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik di Indocina dengan mengirimkan pasukannya ke Vietnam.

Kata Kunci: Pasukan garuda, Vietnam

### Abstract

*The research was motivated by power struggles in Vietnam brought political tensions in Southeast Asia, it is the Indonesian government wants to participate in bringing about peace and trying to help the disputing parties to find a resolution to the problem Vietnamese forces shaping contingent Garuda Indonesia.*

*The results of this study are as follows: Indonesia recognizes that regional cooperation it will not be successful in increasing national and regional prosperity of the nations of Southeast Asia as well as possible, if there is no security and stability in the region. By embracing regional cooperation in Southeast Asia in the forum of ASEAN, Indonesia would like to participate in our settle the conflict in Indochina by sending troops to Vietnam.*

Key Word: Eagle Troops, Vietnam

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Proses dalam mempertahankan kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif mengharuskan Indonesia aktif berjuang membantu bangsa-bangsa terjajah untuk menghapuskan Imperialisme dan kolonialisme demi tercapainya perdamaian dunia. Sifat politik luar negeri Indonesia adalah anti-kolonialisme dan anti-Imperialisme karena kedua hal tersebut secara prinsipil bertentangan

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Jadi jelas, politik luar negeri Indonesia bukanlah bersifat isolisionis di satu pihak ataupun ekspansionis di lain pihak.<sup>1</sup>

Bersamaan dengan usaha stabilisasi di dalam negeri, Pemerintah Republik Indonesia juga berusaha mengisi politik luar negerinya. Politik bebas dan aktif telah diisi dengan politik

<sup>1</sup> CST Kansil S.H. dan Rudy T. Erwin, *Kitab Himpunan Hasil Karya MPRS*, Erlangga, Djakarta, 1970, hal. 133

bertetangga baik, hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama saling menguntungkan negara-negara tetangga. Pembentukan kerja sama regional di Asia Tenggara merupakan suatu usaha konkret untuk menciptakan perikehidupan yang mantap dan aman dalam berbagai bidang. Tetapi Indonesia menyadari kenyataan, kerja sama regional itu tidak akan berhasil meningkatkan kemakmuran nasional dan regional bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan sebaik-baiknya, jika tidak terdapat keamanan dan stabilisasi di kawasan tersebut. Itulah sebabnya Indonesia senantiasa membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indocina. Karena Indonesia berpendapat, menyelesaikan masalah Indocina secara keseluruhan dan Vietnam khususnya sangat penting artinya dalam rangka pemeliharaan keamanan dan menciptakan stabilisasi di Asia Tenggara<sup>2</sup>.

Perebutan kekuasaan di Vietnam membawa ketegangan politik di Asia Tenggara, hal ini mendorong pemerintah Indonesia ingin berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dan berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian masalah Vietnam dengan membentuk pasukan Kontingen Garuda Indonesia IV, V, dan VII. Indonesia berkepentingan menjaga dan memelihara keamanan dan menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Pernyataan resmi Pemerintah Indonesia tersebut disampaikan kepada utusan Istimewa Presiden Nixon, Dr. Henry Kissinger dalam pertemuan di Brussel pada tanggal 22 Nopember 1972.

## 2. Batasan Masalah

Ruang dalam penelitian ini dibatasi di kawasan Indocina khususnya Vietnam, karena Pasukan Garuda IV, V, VII memang hanya bertugas mewujudkan perdamaian di Vietnam.

Untuk pembatasan temporal, penulis membatasi pada tahun 1973 sampai dengan 1975, dengan alasan karena tahun 1973 awal dikirimkannya pasukan Garuda, tepatnya pada tanggal 23 Januari kedua belah pihak yang bersengketa menandatangani naskah perjanjian gencatan senjata (Perjanjian Paris) dalam

rangka mengakhiri perang Vietnam. Selain memuat perjanjian masalah gencatan senjata, Perjanjian Paris juga menyatakan pembentukan suatu komisi pengawasan pelaksanaan gencatan senjata atau disebut (ICCS) di Vietnam. Pada tanggal 28 Januari Pasukan Garuda tiba di Vietnam Selatan, sedangkan tahun 1975 tepatnya pada bulan Juli Pemerintah Indonesia memutuskan menarik pasukan kembali ke tanah air dan berakhirilah tugas Misi Garuda Indonesia di Vietnam.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut yaitu :

- I. Mengapa Indonesia berpartisipasi dalam konflik Vietnam?
- II. Bagaimana partisipasi Indonesia dalam konflik Vietnam?

## 4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas dapat ditentukan tujuan penelitian tentang "Pengiriman Pasukan Garuda ke Vietnam Tahun 1973-1975" yakni :

- I. Menjelaskan apa yang melatar belakangi sehingga Indonesia ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah konflik di Vietnam.
- II. Menjelaskan upaya-upaya Indonesia dalam menyelesaikan masalah konflik di Vietnam.

## 5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan akan menambah khasanah historiografi Indonesia. Selain itu dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan juga memperkaya kajian sejarah terutama mengenai peran serta politik luar negeri Indonesia dan sejarah singkat perjuangan ABRI/TNI di dunia Internasional.

Penulisan sejarah ini diharapkan juga dapat bermanfaat untuk melengkapi referensi perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, terutama di perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah. Hal ini berfungsi sebagai bahan

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 483

informasi bagi seluruh civitas akademik, khususnya mahasiswa sejarah.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bacaan dan bahan kajian sehingga dapat menambah informasi serta pengetahuan tentang Pengiriman Pasukan Garuda ke Vietnam pada tahun 1973 sampai dengan 1975. Selain itu secara umum, penulis berharap tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan manfaat pula bagi dunia pendidikan.

## 6. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang sudah ada tentang Pengiriman Pasukan Garuda ke Vietnam, yang pertama buku karangan Drs. Sardiman A. M. yang berjudul *Kemenangan Komunis Vietnam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik Di Asia Tenggara* yang, menjelaskan Perang Vietnam dalam mencapai kemerdekaan dan pengaruhnya terhadap perkembangan politik di Asia Tenggara. Buku yang kedua karangan Michael Leifer berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia*, menjelaskan Prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia. Buku yang ketiga karangan Genewati Wuryandari yang berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, menjelaskan perkembangan politik internasional dan dampaknya terhadap politik luar negeri Indonesia serta perubahan-perubahan yang terjadi pada pasca Perang Dingin dan bagaimana hal itu mempengaruhi konstelasi politik Internasional.

Jadi diantara buku tersebut, belum ada yang fokus terhadap *Pengiriman Pasukan Garuda ke Vietnam pada tahun 1973 sampai dengan 1975*. Penulis juga tertarik dengan penulisan ini dikarenakan, kesediaan Indonesia dalam komisi perdamaian di Vietnam. Politik luar negeri Indonesia jelas mempunyai suatu tujuan tersendiri selain ikut campur dalam menyelesaikan konflik Vietnam. Karena konflik Vietnam sendiri di dalamnya terdapat campur tangan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Sovyet.

## 7. Metode Penelitian

Penelitian Sejarah ilmiah dan disiplin harus mentaati aturan prosedur kerja disebut metode sejarah. Metode sejarah merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Data yang diperoleh dikonstruksi dengan menempuh proses historiograf.<sup>3</sup> Menggunakan metodologi harus sesuai tahapan interdisipliner sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi) dan pendekatan ilmu bantu untuk mempertajam analisis dalam penelitian.

Pada penelitian ini, penelusuran sumber (Heuristik) mendapatkan Laporan *harian dari Kontingen Indonesia Garuda yang bertugas selama di Vietnam 1973*, oleh Komandan Kontingen Indonesia Garuda, sebagai data primer. Laporan ini mencakup situasi militer, situasi politik serta kondisi Kontingen Indonesia Garuda yang sedang menjalankan tugasnya. Didapatkan juga *Surat perintah pengiriman pasukan Kontingen Indonesia Garuda ke Vietnam*. Berdasarkan kebijakan pertahanan dan politik luar negeri Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dan berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian masalah Vietnam, maka dibentuk pasukan Kontingen Garuda Indonesia untuk dikirim ke Vietnam.

Sumber Koran sejamin juga didapat di Satria Mandala terbit 2 Februari 1973, antara lain Koran Kompas, Ekspres dan koleksi pribadi.

Setelah beberapa fakta yang diperoleh secara kolektif, maka diinterpretasi penafsiran/analisis dari sumber sehingga dapat terekonstruksi fakta sejarah dari sumber tersebut. Interpretasi juga digunakan untuk menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam waktu yang sama.

Pada tahap akhir dilakukan laporan sebagai hasil penelitian sejarah tentang Pengiriman Pasukan Garuda ke Vietnam. Hasil laporan harus tersaji dalam bentuk tulisan, kemudian disusun secara kronologis sebagai kisah sejarah, suatu sintesa yang komperhensif, kausalitas, dan kronologis dalam bentuk skripsi.

<sup>3</sup> Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal: 2

## 8. Sistematika penulisan

Sistematika Penulisan tentang “Pengiriman Pasukan Garuda ke Vietnam Tahun 1973-1975”, Secara pokok terbagi menjadi tiga bagian yaitu Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup. Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab II *Politik Luar Negeri Indonesia*, menjelaskan makna dan tujuan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif. Indonesia berusaha aktif berjuang membantu bangsa-bangsa terjajah untuk menghapuskan Imperialisme dan kolonialisme demi tercapainya perdamaian dunia. Bab III Konflik Vietnam/Indocina, menjelaskan bagaimana proses menyelesaikan masalah Indocina secara keseluruhan dan Vietnam khususnya. ASEAN sebagai asosiasi tertinggi di Asia Tenggara mempunyai peran penting untuk menstabilkan keamanan kawasan, dan Indonesia merupakan salah satu dari anggota ASEAN. Bab IV Pembentukan Pasukan Garuda, menjelaskan peran serta Indonesia untuk menciptakan keamanan dan stabilisasi kawasan Asia Tenggara. Dengan kesediaan Indonesia dalam komisi perdamaian maka di bentuklah Pasukan Garuda IV untuk di kirim ke Vietnam. Bab V Penutup, yang membahas tentang kesimpulan mengenai Pengiriman Pasukan Garuda ke Vietnam Tahun 1973-1975.

### B. KEADAAN POLITIK INTERNASIONAL INDONESIA

#### a. Perang Dingin

Pada bulan September 1947, Soviet membentuk [Kominform](#), yang tujuannya adalah untuk menegakkan ortodoksi dalam gerakan komunis internasional dan memperketat kontrol politik atas negara-negara satelit Soviet melalui koordinasi dari pihak komunis di [Blok Timur](#). Pada tahun yang sama penasihat Presiden Amerika Serikat [Harry S. Truman](#) mendesak Truman untuk mengambil langkah-langkah segera dalam melawan pengaruh Uni Soviet, mengingat upaya Stalin (ditengah kebingungan dan keruntuhannya pasca-perang) untuk

melemahkan Amerika Serikat melalui persaingan yang bisa mendorong kalangan kapitalis agar memicu perang lain.<sup>4</sup>

Doktrin Truman menandai awal dari kebijakan pertahanan bipartisan Amerika Serikat dan konsesus kebijakan luar negeri antara [Partai Republik](#) dan [Demokrat](#) yang benar-benar berfokus pada penahanan dan pencegahan penyebaran komunisme selama dan setelah [Perang Vietnam](#).

Amerika Serikat selanjutnya mulai memperluas kebijakan kontainmen mereka ke Asia, Afrika, dan [Amerika Latin](#) untuk melawan gerakan nasionalis revolusioner yang kebanyakannya dipimpin oleh partai-partai komunis yang dibiayai oleh Soviet dan berjuang dalam menentang dominasi kolonial Eropa di [Asia Tenggara](#) dan wilayah lainnya. Pada awal 1950-an (periode ini kadang dikenal dengan “[Pactomania](#)”), AS membentuk serangkaian aliansi dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, Thailand, dan [Filipina](#) (terutama [ANZUS](#) pada tahun 1951 dan [SEATO](#) pada tahun 1954). Aliansi ini membuat AS memiliki sejumlah pangkalan militer jangka panjang di negara-negara tersebut.<sup>5</sup>

Di Indonesia, anti-komunis garis keras [Jenderal Soeharto](#) meraih kendali pemerintahan dari Presiden [Soekarno](#), dan kemudian mulai membangun “[Orde Baru](#)”. Dari tahun 1965 sampai 1966, militer Indonesia [melakukan pembersihan massal](#) terhadap sekitar setengah juta anggota dan simpatisan [Partai Komunis Indonesia](#) serta organisasi-organisasi sayap kiri lainnya.<sup>6</sup>

Meningkatnya konflik yang sedang berlangsung antara pemimpin [Vietnam Selatan Ngo Dinh Diem](#) dengan komunis [Front Nasional untuk Pembebasan Vietnam Selatan \(NLF\)](#) membuat Amerika Serikat mengirimkan 575.000 tentaranya ke Asia Tenggara untuk melumpuhkan NLF dan sekutu Vietnam Utara

<sup>4</sup> Gaddis, John Lewis. 1990. *Russia, the Soviet Union and the United States. An Interpretative History*. McGraw-Hill. ISBN 0-07-557258-3. hal. 27

<sup>5</sup> Gaddis, John Lewis. *Op. Cit.*, hal. 212

<sup>6</sup> Farid, Hilmar (2007). "Mass Killings and Capitalist Expansion, 1965–1966". In Kuan-Hsing Chen & Chua Beng Huat (Ed.), *[The Inter-Asia Cultural Studies Reader]*. London: Routledge. ISBN 0-415-43134-4. hal. 207–222.

mereka dalam [Perang Vietnam](#), namun kebijakan ini memakan banyak biaya dan melemahkan perekonomian Amerika Serikat, dan pada tahun 1975, krisis ini memuncak dengan kegagalan Amerika Serikat. Dunia memandang peristiwa ini sebagai kekalahan memalukan bagi sebuah negara adidaya yang paling kuat di dunia.

#### b. Konflik Indocina

Pada berakhirnya perang dunia kedua, maka berdasarkan perjanjian Postdam sekutu menyerahkan kekuasaan atas Vietnam bagian Utara kepada Cina dan bagian Selatan kepada Inggris. Dengan demikian maka pada tanggal 2 September 1954 Ho Chi Minh telah memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Vietnam (RDV). Sementara itu tentara Perancis yang membonceng tentara Inggris yang akan melucuti tentara Jepang masuk kembali ke Vietnam. Hal itu telah menimbulkan ketegangan baru antara tentara Perancis dengan RDV.

Pada tanggal 27 April 1954 berlangsung konferensi di Jenewa, namun pada itu pertempuran makin menghebat di Vietnam hingga pada tanggal 8 Mei 1954 jatuhlah benteng Perancis Dien Bien Phu ke tangan Vietminh. Berdasarkan Perjanjian Jenewa pada tanggal 21 Juli 1954, maka terbentuklah 2 Vietnam yaitu Vietnam Utara (RDV) di bawah Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan di bawah Presiden Ngo Dienh Dien. Menilai tentang isi perjanjian Jenewa ternyata bukan suatu akhir, justru ketentuan itu melahirkan dua negara vietnam (Republik Demokrasi Vietnam di utara dan Republik Vietnam di selatan) yang masing-masing memiliki perbedaan pandangan dan ideologi serta tingkah politiknya. Bagi Ho Chi Minh, sebagai pemimpin Viet Minh tidak setuju adanya pembagian Vietnam, karena ia berprinsip "Independent and Unity". Keputusan Konferensi Jenewa yang bertentangan dengan kehendak Ho Chi Minh ternyata akan membawa perkembangan peta politik di Vietnam begitu unik dan kompleks. Pertentangan ideologi serta campur tangan asing tidak bisa di bendung lagi. Dan perkembangan ini tidak terbatas di Vietnam,

namun ikut mempengaruhi perkembangan politik terhadap negara-negara tetangga.<sup>7</sup>

Ho Chi Minh berusaha mempersatukan Vietnam namun Ngo Dienh Dien tidak mau menggabungkannya. Pertentangan ideologi politik melahirkan pertentangan baru. Karenanya Hanoi merubah perjuangan politik menjadi perjuangan bersenjata. Sementara itu Amerika Serikat dan Cina Komunis telah terlibat dalam pertentangan itu. Dan dalam keadaan tersebut tahun 1960 muncul Front Pembahasan Nasional Vietnam Selatan (FPNVS) atau dikenal masyarakat dengan nama Vietcong atau komunis Vietnam dengan dukungan Vietnam Utara dalam menentang kekuasaan Republik Vietnam dan Imperialis Amerika. Vietcong bertujuan untuk melawan rezim Saigon dan imperialis Amerika, menciptakan Vietnam Selatan yang sempurna, Netral, bebas dari campur tangan asing, ingin mempersatukan seluruh Vietnam dan ingin memperbaiki kehidupan sosial ekonomi yang diwujudkan melalui revolusi sosial. Dengan menamakan gerakannya sebagai perang kemerdekaan, Vietcong banyak menarik minat masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam perang Vietnam yang salah sebenarnya adalah politiknya, politik yang mendasari strategi yaitu politik Amerika Serikat yang mencampuri urusan dalam negeri Vietnam Selatan untuk membela suatu rezim anti komunis, yang kenyataannya otokrat, korup, dan tidak didukung oleh rakyat. Maka ditinjau secara ideologis, kelompok-kelompok non komunis yang diwarisi oleh kaum kolonial, ternyata tidak bisa mempengaruhi sampai ke rakyat, sehingga terpaksa mengalami kegagalan dalam bersaing dengan komunisme.

#### c. Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Republik Indonesia tahun 1973-1975 secara keseluruhan memfokuskan kepada kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu dititikberatkan kepada pembangunan nasional, kemakmuran rakyat

<sup>7</sup> Sardiman, AM. 1983. *Kemenangan Komunis Vietnam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik di Asia Tenggara*. Yogyakarta. Liberty, hal. 16-18

<sup>8</sup> Syafii Maarif, A. 1979. *Gerakan Komunis di Vietnam*. Yogyakarta. FKIS-IKIP, hal. 9

serta penegasan kebenaran dan keadilan, sebagai pencermin dari kehendak hati nurani rakyat. Sesuai dengan kepentingan nasional, maka politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak pada salah satu blok ataupun pakta militer. Tujuannya ialah untuk mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Dalam mempertahankan kebebasan itu, sifat aktif dari politik luar negeri tersebut mengharuskan Indonesia aktif berjuang membantu bangsa-bangsa terjajah untuk menghapuskan imperialisme dan kolonialisme demi tercapainya perdamaian dunia, dengan berpedoman pada semangat dan prinsip-prinsip Dasasila Bandung. Sifat politik luar negeri Indonesia adalah anti-kolonialisme dan anti-imperialisme karena kedua hal tersebut secara prinsipil bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Jadi politik luar negeri Indonesia bukanlah bersifat isolasionis disatu pihak ataupun ekspansionis di lain pihak.<sup>9</sup>

#### d. ASEAN

Pada tahun 1966, pemimpin bangsa-bangsa membutuhkan perlunya membentuk suatu kerja sama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial-ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu pada tanggal 5-8 Agustus 1967 di Bangkok dilangsungkan pertemuan menteri luar negeri dari lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Muang Thai. Sebagai hasil pertemuan pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani suatu deklarasi yang diberi nama *Bangkok Declaration*, yang merupakan persetujuan kebulatan tekad lima negara itu untuk membentuk sebuah organisasi kerja sama regional yang disebut *Association of South East Asia Nations (ASEAN)*.<sup>10</sup>

Dengan berdirinya ASEAN diharapkan negara-negara anggotanya bisa membentuk suatu pandangan politik yang sama atau setidaknya paralel dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam maupun di luar negeri, akan tetapi tanpa mengikatkan diri

dalam suatu pakta militer. Hal ini tidak berarti kerja sama dibidang politik atau militer di antara negara anggota ASEAN tersisihkan atau tidak dianggap penting.

Dalam proses perkembangannya tahun 1969-1974 rasa solidaritas telah timbul pada setiap negara anggota, dan mulai tumbuh keyakinan bahwa tegak jatuhnya organisasi regional itu mempunyai pengaruh timbal balik atas maju mundurnya anggota di dalamnya. ASEAN telah mendapat pengakuan dari negara luar sebagai suatu kekuatan organisasi regional Asia Tenggara. Dalam kerja sama politik di antara anggota ASEAN telah mencapai kata sepakat dan menghasilkan Deklarasi Kuala Lumpur 1971, untuk menjadikan wilayah Asia Tenggara suatu daerah damai, bebas dan netral.<sup>11</sup> Dengan demikian kerja sama ASEAN secara formal telah diperluas ke dalam bidang politik, di samping kerja sama ekonomi dan sosial-budaya.

Untuk memberi landasan yang lebih kuat bagi terciptanya perjuangan antara anggota ASEAN dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan regional, diadakan pertemuan kepala-kepala pemerintahan negara-negara ASEAN. KTT ASEAN pertama diselenggarakan pada tanggal 23-24 Februari 1976 di Bali.

### C. KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN REGIONAL

#### A. Keamanan Kawasan

Bersamaan dengan usaha stabilisasi di dalam negeri, pemerintah Republik Indonesia juga berusaha mengisi politik luar negerinya. Politik bebas dan aktif telah diisi dengan politik bertetangga baik, hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga. Pembentukan kerja sama regional Asia Tenggara merupakan suatu usaha konkret untuk menciptakan perikehidupan yang mantap dan aman dalam berbagai bidang. Tetapi Indonesia menyadari kenyataan, kerja sama regional itu tidak akan berhasil meningkatkan kemakmuran nasional dan regional bangsa-bangsa di Asia Tenggara

<sup>9</sup> Drs. CST Kansil S.H. dan Drs. Rudy T. Erwin S.H. 1970. *Kitab Himpunan Hasil Karya MPRS*. Jakarta. Erlangga, hal. 133

<sup>10</sup> *Berita Yudha*, 9 Agustus 1967

<sup>11</sup> Departemen Luar Negeri. 1976. *Asean dan Perkembangannya*. Jakarta, hal 89

dengan sebaik-baiknya, jika tidak terdapat keamanan dan stabilisasi di kawasan tersebut. Itulah sebabnya Indonesia senantiasa berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indocina. Karena Indonesia berpendapat, penyelesaian masalah Indocina secara keseluruhan dan Vietnam khususnya sangat penting artinya dalam rangka pemeliharaan keamanan dan menciptakan stabilisasi di Asia Tenggara.

Indonesia berpendapat, negara-negara di Asia Tenggara adalah yang paling berkepentingan dan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan keamanan serta ketentraman di wilayahnya. Karena itu bangsa-bangsa di Asia Tenggara harus mencegah dan menghalau setiap campur tangan asing yang negatif dalam segala bentuk dan manifestasinya.<sup>12</sup> Dalam Deklarasi Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971, kelima negara anggota ASEAN telah menyatakan Asia Tenggara sebagai daerah damai, bebas dan netral. Bebas dari segala bentuk campur tangan pihak luar.<sup>13</sup>

Dengan tercapainya persetujuan Paris pada tanggal 23 Januari 1973, Republik Demokrasi Vietnam dan Amerika Serikat secara resmi telah meminta Indonesia untuk ikut serta dalam ICCS (*International Commission for Control and Supervision*), yakni suatu komisi pengawasan gencatan senjata di Vietnam Selatan. ICCS terdiri dari empat negara Polandia, Hongaria, Indonesia, dan Kanada (Kanada kemudian menarik diri dan diganti oleh Iran). Pihak yang bersengketa menganggap Indonesia sangat penting untuk diikutsertakan dalam usaha mencari penyelesaian konflik tersebut. Karena Indonesia adalah negara besar dan berpengaruh dalam percaturan politik di Asia Tenggara.

### B. PBB dan Konflik Indocina

Sebagai anggota PBB Indonesia ikut dalam partisipasi usaha-usaha perdamaian. Peran pasukan-pasukan dalam membantu mencari penyelesaian pertikaian di antara

bangsa-bangsa, sehingga tidak berkobar menjadi persengketaan besar yang membahayakan perdamaian dunia. Terbukti dengan dikirimkannya pasukan-pasukan perdamaian Garuda ke berbagai kawasan yang membutuhkannya di antara konflik Indocina.

Pertempuran yang terus berlangsung antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, usaha-usaha mempertemukan kedua pihak terjadi di kota Paris pada tahun 1973. Terbentuklah komisi Internasional atau *International Commission of Control and Supervision (ICCS)*, yang terdiri dari Indonesia, Kanada, Hongaria, dan Polandia. Fungsi ICCS adalah mengadakan penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran persetujuan Paris.<sup>14</sup>

Untuk memenuhi kesanggupan Pemerintah RI sebagai anggota ICCS, maka dibentuklah Misi Republik Indonesia Garuda (Misriga). Sebagai Ketua ditunjuk Duta Besar Indonesia untuk Khmer Letnan Jenderal TNI H. R. Dharsono. Misriga dalam melaksanakan tugasnya melakukan observasi, investigasi, analisis, laporan, negoisasi, yang mencakup bidang politik, hokum dan militer.

### C. Indonesia Dalam ASEAN

Indonesia merupakan salah satu pendiri organisasi ASEAN bersama dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan Muang Thai. Dalam perkembangannya Indonesia mencoba menanamkan kebijaksanaan politik luar negerinya dalam organisasi ASEAN, yaitu ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral, bebas dari segala bentuk campur tangan negara-negara luar.

Ketika Tun Abdul Razak menjadi perdana menteri Malaysia September 1970, pemerintah Malaysia berusaha mengubah hakikat kebijaksanaan luar negerinya. Pada pertemuan negara-negara nonblok di Zambia, dia mengajak para delegasi untuk mendukung netralisasi Indocina dan kalau mungkin seluruh Asia Tenggara yang dijamin oleh tiga negara adikuasa, Republik Rakyat Cina, Amerika

<sup>12</sup> Departemen Penerangan. 1968. *Pidato Presiden Soeharto di depan Foreign Correspondents Club (Perkumpulan Wartawan-wartawan Asing) di Tokyo pada tgl. 30 Maret 1968*. Djakarta. hal. 13

<sup>13</sup> Malik, Adam. 1976. *Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru*. Jakarta. Yayasan Idayu, hal. 29

<sup>14</sup> *Suara Karya*, edisi 29 Januari 1973

Serikat, dan Uni Soviet.<sup>15</sup> Tetapi menteri luar negeri Indonesia mengemukakan keberatan yang beralasan terhadap usul netralisasi Malaysia tersebut. Indonesia menolak gagasan netralisasi, terutama karena adanya ketentuan dalam usul Malaysia tersebut yang mengandung arti bahwa nasib Asia Tenggara akan tetap ditentukan oleh kekuasaan luar. Hal seperti ini merupakan alternatif yang tidak dapat diterima bagi pandangan kawasan Indonesia yang sudah lama ada yang telah dipercayakan kepada ASEAN.

Menjelang akhir November 1971 ketika para menteri luar negeri ASEAN berkumpul di Kuala Lumpur dalam suatu pertemuan khusus, Indonesia mendapatkan dukungan dari semua mitra ASEAN lainnya yang menentang usul Malaysia dengan alasan mereka sendiri-sendiri. Dari pihak Indonesia sendiri, penolakan yang dikemukakan timbul karena usaha pemerintah Malaysia untuk menentukan secara unilateral bagi pengelolaan tata tertib kawasan. Yang lebih mendasar, gambaran utama usul netralisasi tersebut yaitu ketentuan mengenai jaminan negara besar, merupakan suatu penolakan atas kepemimpinan suatu pemerintah yang mempunyai rasa memiliki kawasan yang kuat. Kemungkinan negara luar (termasuk negara komunis) pada akhirnya diberi hak menentukan kebijaksanaan di dalam Asia Tenggara berarti semacam pemilikan bersama yang tidaklah dengan sendirinya bebas dari konflik dan yang mungkin sekali melanggar prinsip-prinsip yang diabadikan dalam pembukaan Deklarasi ASEAN. Malaysia dirasa telah menyeleweng dari gagasan tertib kawasan Indonesia. Dalam kenyataannya gagasan Indonesia adalah yang diterima, dimungkinkan oleh penolakan yang kuat dari pemerintah-pemerintah lain terhadap upaya Malaysia tersebut. Setelah mengalami pembicaraan yang panjang mengenai formula alternatif dan di bawah pengarah Indonesia, para menteri luar negeri menyatakan tekad pemerintahan mereka untuk mengerahkan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan pengakuan, dan penghargaan bagi Asia Tenggara sebagai zona

damai, bebas dan netral, bebas dari segala bentuk campur tangan negara-negara luar.<sup>16</sup>

Pada pertemuan kepala-kepala pemerintahan anggota ASEAN pertama kalinya yang diadakan di Pulau Bali, Indonesia, bulan Februari 1976. Nilai-nilai umum kebijaksanaan luar negeri Indonesia dipertegas lagi, termasuk suatu keputusan untuk menentang intervensi di Asia Tenggara oleh kekuasaan luar. Di samping itu Indonesia dan mitra kawasannya memperlihatkan suatu usaha memajukan dua prioritas; *pertama*, menegaskan dan menegakkan kembali hubungan khusus di dalam ASEAN berdasarkan perasaan keadaan bahaya yang sama di antara pemerintah-pemerintah yang pada dasarnya bersifat konservatif, dan *kedua*, menggunakan kekuatan hubungan itu untuk memprakarsai dialog dengan negara-negara Indocina, terutama Vietnam, dalam upaya menciptakan pemikiran sama yang mungkin dapat berfungsi sebagai dasar bagi tertib kawasan.<sup>17</sup>

Diperhitungkan bahwa jika Vietnam dapat dirangkul, walaupun pada mulanya bersifat tentatif ke dalam suatu kerangka kerja sama kawasan, maka kemungkinan berlanjutnya intervensi kekuasaan luar akan dengan sendirinya berkurang. Perhitungan seperti itu adalah konsisten dengan pernyataan pada kebijaksanaan luar negeri Indonesia dan kerja sama kawasan ASEAN yang dikeluarkan oleh sekretariat ASEAN Indonesia pada tahun 1974. Pernyataan ini menekankan antara lain pentingnya menjadikan ASEAN sebagai bentuk kerja sama kawasan yang sesungguhnya dikembangkan atas dasar kekuatan sendiri untuk menjamin stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari intervensi luar dalam segala bentuk dan manifestasinya.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Latar belakang dan pembahasan mengenai usul Malaysia, lihat Dick Wilson, *The Neutralization of Southeast Asia*, (New York: Praeger, 1975)

<sup>16</sup> Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia, 'Indonesia Foreign Policy and ASEAN Regional Co-operation', *Indonesia Magazine*, No.27 Jakarta, September 1974, hlm. 88

<sup>17</sup> Michael Leifer. 1986. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta. Gramedia, hal. 218-219. DiIndonesiakan oleh Drs. A. Ramlan Surbakti, MA

<sup>18</sup> Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia, 'Indonesia Foreign Policy and ASEAN Regional Co-operation', *Indonesia Magazine*, No.27 Jakarta, September 1974, hlm. 88

## D. PEMBENTUKAN PASUKAN GARUDA

### A. Pembentukan Pasukan International Commission of Control and Supervision (ICCS)

Berdasarkan persetujuan gencatan senjata di Vietnam tanggal 27 Januari 1973 pasal 17 mengenai Konferensi Internasional, kedua pihak Vietnam Selatan segera menunjuk wakil-wakilnya untuk membentuk Komisi Militer Bersama Dua Pihak untuk menjamin pelaksanaan pasal-pasal yang menyangkut hanya kedua pihak. Perselisihan dalam komisi ini akan ditengahi oleh *International Commission of Control and Supervision (ICCS)* Komisi Pengawas Internasional. Pasal 18, setelah penandatanganan naskah ini segera dibentuk ICCS. Pasal 19, semua pihak sepakat untuk mengundang suatu konferensi internasional dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan naskah ini, untuk menjamin berakhirnya perang di Vietnam dan untuk menjamin perdamaian di seluruh Indocina. Washington dan Hanoi mengundang RRT, Uni Soviet, Prancis dan Inggris serta sekjen PBB turut dalam konferensi itu, di samping keempat negara ICCS (Indonesia, Kanada, Polandia dan Hongaria).<sup>19</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya komisi ini berpedoman kepada ketentuan-ketentuan protokol mengenai ICCS. Adapun tugas utamanya yaitu melaporkan kepada pihak-pihak penandatanganan persetujuan Paris tentang hasil pengawasan dan pengamatannya sesuai dengan pasal 18 persetujuan itu. Sedangkan di dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya maka komisi bertindak antara lain yakni mengikuti pelaksanaan ketentuan-ketentuan *Paris Agreement* dengan menghubungi pihak-pihak penandatanganan *Agreement* dan mengadakan observasi setempat di tempat-tempat yang diperlukan. Menyelidiki pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dari *Paris Agreement* yang termasuk wewenang dari ICCS (dalam rangka pengamatan dan pengawasan). Apabila diperlukan mengadakan kerjasama dengan

pihak-pihak dari *Joint Military Commission* untuk mencegah dan mengetahui adanya pelanggaran (pasal 1 Protokol tentang ICCS).<sup>20</sup>

Selanjutnya berdasarkan Persetujuan Paris, maka keseluruhan anggota setiap Delegasi Nasional anggota ICCS berjumlah 290 orang baik yang bertugas di ICCS Pusat Region, maupun di Region dan sub Region. Kemudian ditetapkan pula bahwa ICCS harus tetap memperhatikan jumlah anggotanya yang sedang dan telah melaksanakan tugasnya, sehingga tidak ada kekosongan atau. Khusus mengenai jabatan Ketua, ICCS dijabat secara bergilir di antara para Ketua Delegasi Nasional yang bergabung dalam ICCS.<sup>21</sup>

### B. Kontingen Indonesia Garuda IV

Berdasarkan mukadimah UUD-1945 serta politik luar negeri yang bebas dan aktif, maka Republik Indonesia menyediakan bantuannya dalam berbagai bidang dalam rangka ikut serta memelihara kestabilan dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Karena itu ketika ada permintaan agar RI ikut aktif membantu pelaksanaan Persetujuan Paris mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan gencatan senjata dan perdamaian di Vietnam Selatan, maka RI telah menyatakan kesanggupannya. Untuk itu maka RI telah membentuk Misi Republik Indonesia Garuda (Misriga) dalam rangka keanggotaan Indonesia dalam ICCS. Secara operasional misi ini berada di bawah kendali Menteri Luar Negeri. Sebagai ketua Misriga ditunjuk Duta Besar RI untuk Khamr Letnan Jendral TNI H.R. Dharsono yang dibantu oleh Deputy Politik Imrad Idris dan Deputy Militer Brigjen TNI Wiyogo.<sup>22</sup>

Dari kedudukan dan tugas pokoknya, maka Misriga adalah misi nasional Republik Indonesia yang mengemban amanat melaksanakan tugas-tugas pada ICCS di Vietnam Selatan dalam rangka keanggotaan RI pada ICCS (pasal 18 dari Persetujuan Paris) dengan Menlu sebagai pengendali operasionalnya. Adapun tugas pokok Misriga

<sup>19</sup> Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia AD. 1982. *Dharma Bhakti TNI-AD dalam Tugas Internasional*. Jakarta. Satya Mandala, Hal. 122

<sup>20</sup> Markas Besar ABRI. 1990. *Sejarah Singkat Perjuangan ABRI*. Jakarta. Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, hal. 107

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 109

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 127

melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan *Paris Agreement* beserta protokolnya dalam rangka pemulihan perdamaian dan penghentian perang di Vietnam Selatan, dengan tetap berpedoman kepada politik luar negeri RI yang bebas aktif.

## 1. Dharma Bhakti Garuda IV

### a. Peristiwa Lao Bao

Pada hari Jumat tanggal 6 April 1973 malam Letkol Gunawan SF berada di jalan raya No. 9 menjelaskan bahwa; “Besok kita akan meninjau daerah Lao Bao di mana kita dilaporkan adanya penyusupan personal dan peralatan perang ke Vietnam Selatan Oleh Vietnam Utara”. Pada siang harinya tanggal 7 April 1973 ternyata bahwa pesawat helikopter ICCS-006 yang mengangkut team peninjau yang terdiri dari 9 anggota ICCS (termasuk Letkol Gunawan SF dari Kontingen Indonesia) telah ditembak jatuh oleh peluru kendali jenis side-winder. Padahal sebelumnya telah mendapat jaminan dari pihak Vietcong bahwa route Gio Linh-Lao Bao dalam keadaan aman.<sup>23</sup>

Letkol Gunawan adalah Pa Ops Intel Region 1/Hue. Beliau adalah seorang tokoh di dalam pergaulan sangat supel dan ramah, orangnya simpatik penuh humor dan selalu serius dalam melaksanakan tugasnya. Keramahannya dan keluwesannya sangat menguntungkan ditambah mempunyai kemampuan dan bakat diplomatis menyebabkan anggota-anggota ICCS dari negara lain yang sama-sama betugas selalu menurut pendapatnya. Ketegasannya dan kebijaksanaannya dalam melaksanakan tugas sangat menonjol, pernah berhasil mempengaruhi Delegasi lain yang ragu-ragu mengadakan penyelidikan terhadap insiden demonstrasi Vietnam Selatan terhadap Delegasi Vietnam Utara untuk mengadakan penyelidikan. Dan atas diplomasinya deputy dari JMC yang

<sup>23</sup> Laporan Harian Komando Kontingen Indonesia Garuda IV tanggal 7 April 1973

terdiri dari Pa-Pa AS, Vietnam Selatan, Vietnam Utara, Vietcong yang sangat kontraversil itu bisa dikumpulkan untuk membahas pelaksanaan gencatan senjata di Vietnam.<sup>24</sup>

### b. Pengaruh Peristiwa Lao Bao

Dengan adanya insiden Lao Bao dan gugurnya semua penumpang helikopter 17006 itu, negara yang bersangkutan mengadakan protes keras disertai dengan sangat penyesalannya atas kejadian tersebut. Seperti diketahui hadirnya ICCS di Vietnam ini adalah atas permintaan pihak yang bersengketa untuk mengawasi gencatan senjata dan pemulihan perdamaian di Vietnam dan kedua belah pihak harus menjamin terlaksananya tugas-tugas ICCS dalam daerahnya (pasal 10). Namun kenyataannya adalah suatu hal yang tidak mungkin tidak disengaja kejadian itu, karena ICCS menggunakan tanda-tanda yang jelas dapat dilihat, dibedakan dan mudah dikenal lain dari pada yang lain. Setidak-tidaknya tembakan tersebut berupa tembakan peringatan bukan tembakan yang diarahkan/dikenakan, karena ICCS bukan musuh.

Akibat dari peristiwa Lao Bao bagi ICCS adalah tuntutan kelebaran koridor untuk jaminan keamanan penerbangan helikopter diperkeras, sehingga ini berakibat gagalnya tukar menukar tawanan perang (POW). Selain itu juga pembatalan pemasukan team-team operasi di daerah Vietcong (PRG) dan Vietnam Utara dikarenakan belum adanya jaminan keamanan yang 100 %, karena dalam kenyataannya kegiatan ICCS sangat dibatasi dalam resuplai dan sulit untuk ditarik kembali.<sup>25</sup>

Peristiwa Lao Bao juga berpengaruh di mata politik Internasional yaitu, mengurangi kepercayaan dan diragukan untuk

<sup>24</sup> Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia AD. *Op. Cit.*, hal. 150

<sup>25</sup> Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia AD. *Op. Cit.*, hal. 153

diterima menjadi negara yang syah berdaulat penuh serta hubungan diplomatis kecuali negara-negara yang seideologi dengan Vietcong. PBB juga semakin menjauh dari Vietcong dan ICCS hanya dipergunakan sebagai alat dari kedua belah pihak yang bersengketa, karena Amerika Serikat ingin mundur dari Vietnam secara terhormat, perang Vietnam mempengaruhi politik di dalam negeri Amerika Serikat serta mempengaruhi ekonomi (pemborosan biaya, material dan nyawa). Sedangkan bagi Vietcong ICCS atau *Paris Agreement* hanyalah satu tahap dalam perjuangan agar Amerika Serikat keluar dari Vietnam.

Dengan gugurnya semua penumpang helikopter termasuk Kolonel Gunawan SF dari Kontingen Indonesia, maka Menhankam/Pangab telah menyampaikan ucapan berduka cita. Dan Presiden Amerika Serikat juga berpendapat bahwa penembakan terhadap helikopter ICCS yang mengenakan tanda-tanda yang dikenal sebagai sangat serius. Kemudian di lain pihak Menteri Sharp dalam laporannya kepada DPR berhubung kematian anggota kontingen Kanada dalam peristiwa Lao Bao kemungkinan Kanada akan menarik kontingennya dari ICCS.

Pada tanggal 18 April 1973 ICCS mengadakan sidangnya ke 48. Pada kesempatan itu Pejabat Ketua Delegasi Indonesia Dubes Imrad Idris telah mengemukakan peristiwa Lao Bao sebagai berikut: Dalam waktu 10 hari terakhir sejak peristiwa Lao Bao yang amat disesalkan kita menjadi sasaran daripada pernyataan-pernyataan, laporan dan tulisan pers mengenai peristiwa tersebut dengan aneka ragamnya, dan kadang-kadang sebagian dengan tafsiran yang membingungkan. Sudah menjadi harapan kami yang mendalam agar komisi ini tidak terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan dan kesimpulan-kesimpulan yang dibuatnya, dan agar

komisi ini diberi kesempatan untuk melaksanakan pemeriksaan seefektif mungkin dengan semua cara dan alat yang ada padanya. Lebih-lebih adalah menjadi keyakinan kami bahwa ia membela salah satu dari pihak yang tersangkut di dalam peristiwa yang sangat disesalkan ini. Adalah menjadi keyakinan kami juga sebagai komisi kami mempunyai tanggung jawab kepada Pemerintah dan rakyat kami masing-masing dan juga kepada keluarga dari pada anggota-anggota kita yang bertugas di Vietnam. Dalam rangka ini saya juga menekankan, bahwa kami datang ke Vietnam atas permintaan daripada penandatanganan-penandatanganan dari pada Perjanjian Paris. Sebagai komisi, kita sejak hari permulaan bekerjanya dan pada kesempatan-kesempatan yang beraneka warna mendesak kepada JMC untuk bekerja sama lebih erat di antara mereka sendiri dan dengan komisi. Sejak bulan ini kita harus berhubungan dengan JMC dua pihak yang menurut pendapat kami tidak hanya menghadapi masa baru melainkan masa yang penuh dengan kesukaran-kesukaran yang belum terpecahkan.<sup>26</sup>

Delegasi Indonesia sebagai satu-satunya anggota Asia dari pada komisi ini melakukan segala daya upaya untuk menggarisbawahi pentingnya kerja sama semacam ini dan berjanji untuk berbuat demikian seterusnya melalui cara sendiri. Tidak dapat diingkari bahwa Indonesia sebagai negara tetangga dari pada Vietnam adalah paling berprihatin dengan perdamaian di bagian dunia ini. Lebih-lebih bangsa Indonesia dan bangsa Vietnam terikat oleh hubungan sejarah dan kebudayaan, serta mengalami persamaan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Kami yakin bahwa pengorbanan yang telah diberikan oleh anggota-anggota ICCS dalam melaksanakan tugasnya di

<sup>26</sup> Laporan Harian Komando Kontingen Indonesia Garuda IV. Tanggal 18 April 1973

Vietnam tidak boleh sia-sia. Harus dipahami dengan jelas, bahwa kami datang ke Vietnam tidak untuk menyaksikan anggota-anggota kita mengakhiri hidupnya di dalam peristiwa-peristiwa semacam di Lao Bao. Maka dari itu Delegasi Indonesia tidak akan membiarkan bahwa pengorbanannya dirahasiakan bagi komisi dan bahwa komisi ikut ternoda seakan-akan ikut bertanggung jawab walaupun sebagian.<sup>27</sup>

Dengan tandas kami ingatkan kepada kedua pihak di Vietnam Selatan untuk berusaha sekuat-kuatnya menepati perjanjian Paris, khususnya yang menyangkut jaminan akan keamanan anggota ICCS. Sehubungan dengan ini delegasi Indonesia sekali lagi minta perhatian komisi mengenai usul-usulnya dengan sudah terjadinya peristiwa Lao Bao. Apabila usul ini gagal untuk disetujui oleh komisi, maka delegasi Indonesia mempunyai hak untuk secara pihak menarik kembali team-teamnya ke Markas Region dan menungguhkan ikut sertanya di dalam pemeriksaan-pemeriksaan kapan saja dan di mana saja dianggap perlu.<sup>28</sup>

Sementara itu Ketua ICCS dari Indonesia Letjen TNI HR Dharsono pernah menyatakan bahwa tugas-tugas ICCS sepenuhnya tergantung pada kemauan baik, dukungan dan kerja sama pihak-pihak yang bersangkutan di Vietnam. Letjen TNI Dharsono juga mengharpkan pihak Saigon dan Vietcong yang jadi anggota JMC agar betul-betul membantu dan mendukung tugas-tugas ICCS yang misinya membantu penyelesaian perdamaian di Vietnam.<sup>29</sup>

Kontingen Indonesia Garuda IV akan mengakhiri tugasnya. Demikian

<sup>27</sup> Markas Besar ABRI. 1990. *Sejarah Singkat Perjuangan ABRI*. Jakarta. Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, hal. 158

<sup>28</sup> Humas Konga IV, Penerangan Pasukan No. 76, Saigon, Tanggal 29 Mei 1973.

<sup>29</sup> Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia AD. *Op. Cit.*, hal. 181

setelah rombongan pertama Konga IV kembali ke tanah air, maka pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1973 pagi berangkatlah 33 orang anggota Konga V terakhir menuju Saigon. Dan pada hari itu juga sore harinya 34 anggota Konga IV yang dipimpin oleh Ketua Misriga Bidang Militer Brigjen TNI Wiyogo telah tiba kembali di tanah air setelah 6 bulan bertugas di Vietnam Selatan. Mereka merupakan gelombang ke-5 sebagai gelombang terakhir dan diangkut dengan pesawat C 130 Hercules TNI AU yang mendarat di Lanuma Halim Perdanakusumah.

## 2. Dharma Bhakti Kontingen Garuda V

Pada tanggal 23 Juli 1973 anggota Konga V yang telah tiba di Saigon mulai diberangkatkan ke Region-region dan Sub Region untuk segera melaksanakan tugas-tugas pengawasan gencatan senjata di Vietnam bersama anggota ICCS lainnya. Penggantian tugas dari Konga IV dilaksanakan beruntun sesuai dengan datangnya rombongan gelombang pertama hingga kelima dari Konga V. Setelah Konga V menempati posisinya masing-masing, maka situasi dan kondisi yang dihadapinya di Vietnam tidak banyak perbedaan dengan yang di hadapi Konga IV. Di samping sikap Kontingen Hongaria dan Polandia yang selalu tidak seirama dengan Kontingen Indonesia dalam melaksanakan misi perdamaian sesuai dengan persetujuan Paris maka setiap harinya ICCS selalu menghadapi Comlaint dari pihak yang berselisih, mengenai penembakan dengan berbagai jenis mortir, roket, senapan mesin, pemboman, serangan infiltrasi, peranjauan, penghadangan, perusakan dan lain-lain. Pada dasarnya semua itu memerlukan observasi, investigasi oleh ICCS.<sup>30</sup>

Demikianlah selintas mengenai kegiatan Konga V di Vietnam Selatan yang semakin lama semakin berat. Apalagi setelah ada pernyataan Panglima Daerah

<sup>30</sup> Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia AD. *Op. Cit.*, hal. 194

Dataran Tinggi Tengah dan Partai Vietnam Selatan di Pleiku Mayjen Nguyen Van Ton, bahwa Vietnam Utara telah membangun perlengkapan-perengkapan perang dan jalur-jalur perbekalan di Vietnam Selatan sebagai persiapan untuk suatu serangan besar-besaran pada awal tahun 1974. Pernyataan lebih dikuatkan lagi setelah kemudian ditandatangani persetujuan antara Cina dan Vietnam Utara mengenai bantuan militer Cina dalam tahun 1974 yang ditandatangani di Peking oleh Wakil Kepala Staf Umum Cina Li Ta dan Dubes Vietnam Utara di Peking Ngo Thuven. Mendekati masa akhir tugas Konga V di Vietnam Selatan itu Pemerintah masih tetap mempersiapkan pasukan Konga VII yang akan menggantikan Konga V tersebut. Kemudian kembalinya Konga V ke tanah air dibarengi dengan keberangkatan Konga VII ke Vietnam Selatan untuk juga melaksanakan tugas-tugas ICCS.

### 3. Dharma Bhakti Kontingen Garuda VII

Dengan hampir berakhirnya masa tugas Garuda V di Vietnam Selatan, maka RI masih memandang perlu untuk tetap aktif menegakkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Khususnya di Vietnam dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas ICCS sebagai pengawas pelaksanaan Persetujuan Paris pada tanggal 27 Januari 1973. Oleh karena itu sebelum Kontingen Garuda V kembali ke tanah air, maka telah dipersiapkan Kontingen penggantian yang beri nama Garuda VII/ICCS. Vietnam Selatan atau Konga VII.

Bersama dengan anggota Konga VII dari AU, AL dan Polri mereka telah diberangkatkan ke Vietnam Selatan untuk mengemban tugas Negara di bawah ICCS. Setibanya di Vietnam Selatan mereka segera menggantikan pos-pos yang di tempati Konga V bersama anggota – anggota Kontingen Polandia, Hongaria dan Iran. Namun tugas yang dihadapinya semakin berat karena pelanggaran-pelanggaran oleh kedua pihak yang berselisih lebih mengarah kepada perang

terbuka. Apa yang disinyalir oleh Panglima Daerah Militer Dataran Tinggi Tengah bahwa pada awal tahun 1974 Vietnam Utara akan melancarkan serangannya dengan gencar telah dikuatkan dengan ditandatangani persetujuan bantuan militer Cina kepada Vietnam Utara yang di tandatangani di Peking, dan kenyataannya Vietnam Utara semakin menekan Vietnam Selatan.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan situasi di Vietnam yang semakin buruk, Menlu Adam Malik telah menyatakan kemungkinan Konga akan ditarik dari Vietnam. Dalam pada itu delegasi RI ke ICCS telah menyerukan agar PRSVS dan Saigon berunding kembali akan tetapi mengingat Vietnam Selatan mulai terdesak dan keamanan para anggota ICCS terancam, maka pada bagian terakhir minggu ketiga bulan Maret Departemen Hankam RI mengumumkan manarik personal-personal Garuda VII yang kini bertugas di daerah-daerah yang diancam peperangan. Namun hingga tanggal 19 Maret 1975 personal Garuda VII yang bertugas di delapan pos ICCS sudah ditarik.

Pada tanggal 31 Maret 1975 sore Konga VII sebanyak 45 orang tiba kembali di Jakarta. Perkembangan terakhir di Vietnam Selatan menunjukkan bahwa pada tanggal 30 April 1975 pemerintah Vietnam Selatan di Saigon telah menyerah tanpa syarat, bendera PRG-Vietcong berkibar di istana kepresidenan di Saigon. Akhirnya pada bulan Juni 1975 Kementerian Luar Negeri Vietnam Selatan telah mengumumkan secara resmi berakhirnya peranan Komisi Pengawas Gencatan Senjata Internasional 4 negara (ICCS) di Vietnam Selatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Persetujuan Perdamaian Paris. Dengan itu maka berakhirilah pelaksanaan tugas Kontingen-kontingen dalam ICCS.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia AD. *Op. Cit.*, hal.203

<sup>32</sup> Laporan Harian Komando Kontingen Indonesia "Garuda IV". Tanggal 31 Maret 1975

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulgani, Roeslan. 1957. *Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- CST Kansil, Drs, S. H dan Drs, Rudy T, Erwin, S. H. 1970. *Kitab Himpunan Hasil Karya MPRS*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Luar Negeri. 1971. *Duapuluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri*. Djakarta.
- Departemen Luar Negeri. 1976. *ASEAN dan Perkembangannya*. Jakarta.
- Departemen Luar Negeri. 1976. *Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru*. Jakarta.
- Departemen Penerangan. 1965. *20 Tahun Indonesia Merdeka*. Djakarta.
- Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia AD. 1982. *Dharma Bhakti TNI-AD dalam Tugas Internasional*. Jakarta.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hatta, Mohammad. 1953. *Dasar-dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Djakarta: Tintamas.
- Holsti, K. J. 1987. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta.
- Leifer, Michael. 1986. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Malik, Adam. 1966. *Politik dan Ekonomi*. Djakarta: Departemen Penerangan.
- Malik, Adam. 1976. *Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Notosusanto, Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prawirasaputra, Sumpena, Rd. 1984. *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Bandung: Remaja Karya CV.
- Sardiman, Drs, A. M. 1983. *Kemenangan Komunis Vietnam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Liberty.